

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Al-Qur'an dan Terjemahan

Abdul Rashid Moten, 1422 H./2001 *Ilmu Politik Islam*, Penerjemah, Munir A. Muin dan widyawati Bandung: Pustaka.

Ali Asqhar, Engineer. 1999. *Islam dan Teologi Pembebasan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Ariezta Monde. 2014 *Lorong Waktu*. Jakarta: Transmedia

Asshiddiqie, Jimly. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Press

Budiman, 19 *Covid Pandemi dalam 19 Perspektif*, IAIN Parepare Nusantara Press

Burhan Bungin, 2007, *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

Dr. Aly Sirojuddin, 2017 *Pemikiran Politik Islam (Sejarah, Praktik dan Gagasan)* Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah

Dr. Muhammad Dhiauddin Rais, 2001 *Teori Politik Islam An-nazhariyatu as-siyasatul-islamiah*, Jakarta: Gema Insani Preess

Jhony Ibrahim, 2007. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.

Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung : Alumni. Pembukaan UUD NRI Tahun 1995

Ni'matul Huda, 2011 *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta; FH UII Press

W.Mas'udi & Winanti, P. S, 2020, Dari Krisis Kesehatan ke Krisis Tata Kelola. In W. Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia Kajian Awal, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press

M Hadjon Philipus, 1985, *Pengertian-Pengertian Dasar tentang Tindak Pemerintahan (Bestuurshandeling)*, Djumali, Surabaya

Minarno Basuki Nur, 2009 *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Mediatama

- Muhammad ibn Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, kitab *al-Iman wa al-Nuzur*, bab *Qauluhu Ta'ala La Yu'akhizukumullah Billagwi fi Imanikum*,
- Nugroho Lucky, Amalia E Maulana, Asep S Bahri, 2020 *Indonesia Maju dan Bangkit*, CV Penerbit Qiara Media, pasuruan Jawa Timur
- Paduan Komprehensif syariah & Ekonomi Islam, Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin
- Peter Mahmud Marzuki. 2012. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Pranadamedia Group.
- Soekanto Soerjono, 2002, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press
- \_\_\_\_\_. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta Universitas Indonesia (UI) Press.
- Wiyono R, 1986 *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Alumni, Bandung

**Perundang-undangan :**

- UU RI No 8 Tahun 2015 pasal 122 ayat (1) dan (2) Tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang.
- Undang-undang No 10 tahun 2016 pasal 201 ayat (10) dan (11) tentang pilkada yang mengatur mekanisme pengisian lowong jabatan kepala daerah.
- Undang-Undang Pilkada Pasal 120 Ayat 1
- Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-Alam Covid19.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional

Keppres Nomor 11 tahun 2020

**Jurnal :**

Agung Julianto, Jurnal Garut 2020, “*Sudah Dimulai, Begini Aturan Kampanye Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi*”, PT Kolaborasi Mediapreneur Nusantara.

Budiyono, *Pengaturan Ulang Pengisian Jabatan Kepala Daerah Berdasarkan Prinsip Kedaulatan Rakyat*, Jurnal Hukum, Volume 7 No. 2, Mei-Agustus 2013

Crepido, *Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 di Indonesia*, Volume 02, Nomor 02, November 2020, di akses 02 Juli 2021

David GG, Ni Made D, *Urgensi Penyelenggaraan Pilkada Pada Masa Pandemi Covid 19 di Indonesia*, Jurnal Locus Delicti, 2020, Vol 1 No, 1

Mohammad Ilham Agang, “*Pembatasan Masa Jabatan Kepala Daerah Di Negara Republik Indonesia*”, Jurnal Borneo, Vol. 2 Issue. 2 Tahun 2018

Panji Rezky PMH. *Urgensitas Perppu Pilkada Di Kala Wabah Pandemi Covid-19*, 2020 Jurnal Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 4, No. 1

Rohim Nur, *Gagasan Pemilukada Serentak dan Implikasinya Terhadap Pesta Demokrasi yang Efektif dan Efisien*, 2016 Jurnal Nanggroe, Vol. 3 No. 3

Suharti. MH.I, *Al-Siyasah Al-Syar’iyyah ‘Inda Ibn Taimiyah (Politik Islam Ibnu Taimiyah)*, *Al-Ittihad* Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Volume I 2 No. 2, Jul-Des 2015.

Melfa, W, 2013, “*Penataan Hukum Menuju Hukum Ideal Dalam Pengaturan Pemilukada*”, Jurnal Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Masalah-Masalah Hukum, Vol. 42, (No. 2)

**Website :**

Astuti Indriyani, UU Pilkada tak Cukup jadi Landasan Hukum Penundaan,” 29 Maret 2020, <https://mediaindonesia.com/read/detail/299715-uu-pilkada-tak-cukup-jadi-landasan-hukum-penundaan>, diakses 27 Desember 2020

Diagram Undang-undang Pemilu Drs. Herry Rudolf Nahak. M. Si. Kepolisian Negara Republik Indonesia 2019. [www.polri.go.id](http://www.polri.go.id), di akses 29 Desember 2020

Bawaslu Grobongan, Pemimpin Dan Politik Uang Dalam Pandangan Islam, 28 april 2020, di akses 09 februari 2021  
<https://grobogan.bawaslu.go.id/pemimpin-dan-politik-uang-dalam-pandangan-islam.html>

Eko Budiono, *UU Pilkada Jadi Acuan Pengisian Kekosongan Kepala Daerah*, Jakarta, InfoPublik [Http://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/448967/uu-pilkada-jadi-acuan-pengisian-kekosongan-kepala-daerah](http://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/448967/uu-pilkada-jadi-acuan-pengisian-kekosongan-kepala-daerah) di akses 30 Desember 2020

Erlangga Pratama. *Meneropong pilkada serentak pasca pandemi*, 2020 [Jurnalintelijen.net](http://Jurnalintelijen.net), di akses 28 Januari 2020

<https://id.m.wikipedia.org>, Jabatan Pimpinan Tinggi Apatur Sipil Negara, di akses 4 February 2021

[Http://perludem.org/2017/11/30/undang-undang-tentang-pemilihan-kepala-daerahpilkada/](http://perludem.org/2017/11/30/undang-undang-tentang-pemilihan-kepala-daerahpilkada/)

[www.jawapos.com](http://www.jawapos.com), <https://www.jawapos.com/nasional/25/06/2020/jika-pilkada-ditunda-mahfud-sebut-bisa-buat-kerugian-lebih-banyak/>, di akses 5 February 2021

KBBI Online. 2010

KPT Nomor 179 tahun 2020, [jdih.kpu.go.id](http://jdih.kpu.go.id), di akses 7 february 2021

Meidanti Irfan, *Membaca Dampak dari Penundaan Pilkada 2020 Akibat COVID-19* <https://voi.id/bernas/4261/membaca-dampak-dari-penundaan-pilkada-2020-akibat-covid-19>, di akses 9 February 2021

- Muhammad Ahsan Ridhoi, *Nasib Suksesi Kepala Daerah di Tengah Pandemi*, <https://katadata.co.id/muhammadridhoi/indepth/5e9a41f7344ac/nasib-suksesi-kepala-daerah-di-tengah-pandemidi> akses 30 Desember 2020
- Murtri novianto, *Tindak Lanjut Perppu Penundaan Pilkada*, Vol XII, No.10/II/Puslit/mei/2020 berkas.dpr.go.id, di akses 03 januari 2021
- Syahdan, *Dampak pemekaran wilayah terhadap pelayanan public Studi pada kantor camat moram outara Kabupaten konawe selatan*, 2018, kenadar, <Ojs.uho.ac.id>, di akses tanggal 08 februari 2021
- Susanti Bivitri, *Pilkada di Tengah Pandemi COVID-19, Haruskah Tetap Dilaksanakan?*, JuristSeleb, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5efc763f109f2/pilkada-di-tengah-pandemi-covid-19-haruskah-tetap-dilaksanakan>-di akses 27 Desember 2020